

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, F., Dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Astomo, P. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Gazali. (2022). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Mataram: Sanabil.
- Handoyo, E., Dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hikmat, M. M. (2018). *Jurnalistik: Literery Journalism*. Jakarta: Prenada Media.
- Ikhwan, M. dan Sukmawati, D. (2021). *Buku Ajar: Produksi Media Digital*. Bekasi: Ubhara Jaya Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Milyane, T. M., Dkk. (2023). *Literasi Media Digital*. Bandung: Widina Media Utama.
- Partodihardjo, S. (2008). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Qamar, N. dan Rezah, F. S. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Regulasi perundang-undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Soeprapto, M. F. I. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Suherdiana, D. (2020). *Jurnalistik Kontemporer*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media.

B. Jurnal

Aji, A. B. W., Dkk. (2024). Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Regulasi perundang-undangan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 96-110.

Akbar, T. H., dan Jalil, H. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 178-188.

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89-106. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170-178. DOI: <https://doi.org/10.14710/ihis.v0%vi%i.6671>.

Budoyo, S. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Regulasi perundang-undangan. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.26877/civis.v4i2.613>.

Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art1>.

- Fauzar, A. S. (2022). Analisis Terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2), 1242-1269. DOI: <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17633>.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., dan Lukitasari, D. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 220-228. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413>.
- Muldani, T. (2022). Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 148-163. DOI: <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>.
- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Buletin hukum dan keadilan*, 4(3), 37-48. DOI: <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71-85. DOI: <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>.
- _____. (2020). Persimpangan Kebebasan Bereksprei dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(1), 77-93. DOI: <https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.1.2020.77-93>.

- Rahmi. (2019). Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 6(1), 78-85.
- Rezkiana, D., Akbar, M., dan Hasmin, M. Y. (2019). Peranan Dewan Pers dalam Penyelesaian Sengketa Pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), 1647-1657. DOI: <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.696>
- Sara, R., Lineker, T., Daton, F. S., dan Batubara, M. I. Z. (2025). Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Retentum*, 7(1), 487-498. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5388>
- Setyowati, A., dan Kencono, P. S. (2024). Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1-18. DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.
- Suparman, Asmara, G., dan Zunnuraeni. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 1-11. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>.
- Tresnadipangga, B., Fuad, F., dan Suartini. (2023). Harmonisasi Regulasi perundang-undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 213-226. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.438>.
- Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196-216. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-31. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.

Zuhri, S., dan Fadil, C. (2024). Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat. *Crossroad Research Journal*, 1(4), 118-139. DOI: <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.182>.

C. Regulasi perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negaran Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Regulasi perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Nomor 5952)

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Terterntu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Skripsi, Tesis, Disertasi

Ulum, R. B. (2022). Strategi Bauran Promosi Perusahaan Fesyen Muslimah.

Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.

Imron, M. (2022). Kedudukan Keputusan Bersama Tentang Pedoma

Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan

Transaksi Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.

Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

E. Internet

Dewan Pers. "Data Perusahaan Dewan Pers (siber)".

<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

_____. "Data Perusahaan Dewan Pers (siber)".

<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

_____. "Pertimbangan Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers". <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 09.00 WIB.

JDIH BPK Database Peraturan. "Statistik Peraturan".

<https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2025 Pukul 21.45 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2023). *Arti kata Norma*.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024 Pukul 10.45 WIB.

_____. (2024). *Arti kata Media*.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

-
- . (2025). *Arti kata Media Elektronik*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2025 Pukul 13.15 WIB.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZ0Z.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZ0Z.pdf). Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 19.30 WIB.
- Mantalean, V. dan Prabowo, D. (2021). “*Anggap UU ITE Momok Media, AJI Catat 3 Jurnalis Dipenjara Sepanjang 2021*”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/29/21061491/anggap-uu-ite-momok-media-aji-catat-3-jurnalis-dipenjara-sepanjang-2021>. Diakses pada tanggal 15 September 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Soegiyono. (2015). “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Regulasi perundang-undangan”. *Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional*. https://karya.brin.go.id/id/eprint/11969/1/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 Pukul 13.00 WIB.
- Taher, A. P. (2021). “*Janggalnya Kasus Jurnalis Asrul: Abaikan UU RI No. 40/1999 & Dijerat UU ITE*”. <https://tirto.id/janggalnya-kasus-jurnalis-asrul-abaikan-uu-pers-dijerat-uu-ite-gkwL>. Diakses pada tanggal 21 September 2024 Pukul 17.00 WIB.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 20.00 WIB.